

# PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN PEREMPUAN: DARI IDEOLOGI PATRIARKI KE PRAKTIK PEMUJAHAN TUBUH

**Tjiptohadi Sawarjuwono**

*Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya*

*E-mail: tjipto\_fe\_unair@yahoo.com*

**Anantawikrama T. Atmadja**

*Mahasiswa Magister Akuntansi Pascasarjana*

*Universitas Airlangga Surabaya*

## **Abstract**

*The patriarch culture which apply to balinese society nowadays slowly fade away. Equal formal education values between male and female indicate this degradation. Parents are giving their daughters freedom to seek education. When related to the field of accounting, Balinese women pay more interest compared to Balinese men. It is well-known that accounting is considered a masculine field of study. Data acquired from a Balinese university show that the number of female students in the department of accounting is greater than male students. This essay attempts to seek the reason why women choose accounting, whether there are any parental influences or of personal desire, and whether gender ideologies have a role in their decision.*

*There are a few reasons which support parental choice and balinese women's decision. First of all, education boosts social status. Second, accounting profession suits the women's job. Third, short study period, smaller investment in terms of money, and have greater job opportunity. Through D3 Accounting Educational Degree Program Balinese women gain more values, intellectually, economically, and politically therefore having greater bargaining power towards their environment.*

**Keywords:** *Balinese women's role, Patriarch culture, Accounting education, Accounting's role*

## **PENDAHULUAN**

Ideologi patriarki atau Fromm (2002) menyebutnya sebagai budaya patriarkal sangat kuat pengaruhnya pada masyarakat Bali. Aktualisasinya terlihat pada struktur sosial, yakni laki-laki mendominasi perempuan dengan berbagai cara (Bhasin, 1996, 2002). Hal ini diperkuat oleh agama Hindu, yang tercermin pada makna suami yang berasal dari bahasa Sansekerta, yakni *svami* yang berarti pelindung serta bapak yang

dihormati dalam keluarga. Karena itu, suami adalah pemimpin yang memegang *policy* dalam keluarga, sedangkan istri dan anaknya adalah anak buah (Jaman, 1998; Kusujiarti, 1997). Dengan demikian, meminjam rumusan Gramsci (dalam Hendarto, 1993) subordinasi laki-laki atas perempuan, tidak saja bercorak dominasi, yakni pemaksaan secara fisik melalui hukuman dan ganjaran, tetapi juga dengan cara hegemoni, yakni memasukkan keyakinan agama ke

dalam norma yang berlaku sehingga apa yang terjadi sepertinya berdasarkan konsensus.

Budaya patriarkal yang berlaku pada masyarakat Bali berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang menggariskan bahwa anak laki-laki adalah *pancer* keluarga, penerus dinasti, *wangsa* (kasta) maupun *soroh* (klen) (Panetje, 1986). Bahkan yang tidak kalah pentingnya, anak laki-laki berperan pula sebagai penyelamat keluarga dari penderitaan neraka yang disebut *neraka put* - ini melahirkan kata putra dalam bahasa Indonesia (Pudja, 1975). Ide penyelamatan berkaitan erat dengan kewajiban anak, yakni melaksanakan ritual pembakaran jenazah dengan segala rangkaianannya, yakni *ngaben* dan *ngerorasin* guna mengantarkan roh orang tua maupun leluhurnya ke alam kedewataan sehingga mereka berhak memakai gelar *Dewa Pitara* dan beristana di *Sanggah Kemulan* – pura keluarga yang berfungsi sebagai tempat memuja roh leluhur yang telah disucikan (Wiana, 1992, Wikarman, 1993). Karena itu, anak laki-laki sangat penting dilihat dari segi hukum, sosial, ekonomi, budaya dan agama sehingga tidak mengherankan jika mereka dinomorsatukan daripada anak perempuan.

Namun dewasa ini, ada kecenderungan bahwa penomorsatuan anak laki-laki sepertinya tidak berlaku lagi. Gejala ini dapat dicermati pada pemberian peluang menempuh pendidikan formal antara anak laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada kesetaraan. Hal ini tercermin misalnya, pada komposisi mahasiswa Jurusan D3 (diploma tiga) Akuntansi IKIP Negeri Singaraja pada tahun 2004 yang berjumlah 124 orang, ternyata sebagian besar, yakni sebanyak 83 (67%) orang adalah perempuan, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 41 (33%) orang adalah laki-laki. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, dominasi jumlah mahasiswi atas mahasiswa pada Jurusan D3 Akuntansi, tidak saja terjadi pada tahun 2004, melainkan sejak Jurusan Akuntansi didirikan pada tahun 1999. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Apabila dicermati data pada Tabel 1, jelas terlihat bahwa jumlah mahasiswi selalu lebih banyak daripada mahasiswa. Karena itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa Jurusan D3 Akuntansi adalah jurusan favorit bagi kaum perempuan.

**Tabel 1.** Komposisi Mahasiswa Jurusan D3 Akuntansi IKIP Negeri Singaraja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 1999/2000 – 2004/2005

Tahun Ajaran	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Persentase)
1999/2000	10 (40%)	15 (60%)	25 (100%)
2000/2001	7 (23%)	24 (77%)	31 (100%)
2001/2002	13 (25%)	39 (75%)	52 (100%)
2002/2003	16 (21%)	61 (79%)	77 (100%)
2003/2004	17 (20%)	68 (80%)	85 (100%)
2004/2005	41 (33%)	83 (67%)	124 (100%)

Sumber: Data Olahan

Namun, satu hal yang menarik di balik data tersebut adalah terdapatnya indikasi bahwa orangtua sepertinya menganut asas keberpihakan terhadap anak perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pendidikan. Gejala ini tentu saja sangat menggembirakan dilihat dari sudut pandang asas emansipatoris yang merupakan *culture focus* bagi perjuangan kaum perempuan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, apa yang tampak pada tabel tersebut menjadi semakin menarik, karena terjadi pada bidang ilmu akuntansi, mengingat bahwa selama ini ada konotasi akuntansi adalah sebuah disiplin ilmu yang maskulin (Lehman, 1992; Raffield and Coglitore, 1992; Kirkham, 1992; Kirkham and Loft, 1993; Larkin, 1997). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang akuntansi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia merupakan hal yang rasional, logis serta dapat dianalisis. Segala perhitungan dan pengukuran dalam akuntansi memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang rasional, efisien serta bertujuan untuk memaksimalkan profit. Dengan kata lain, akuntansi sangat berdimensi materialistik yang diasosiasikan dengan maskulinitas (Hines, 1992).

Maskulinitas akuntansi mendorong kurang dapat diterimanya perempuan dalam profesi ini yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketimpangan gender pada profesi akuntansi (Kirkham and Loft, 1993). Ketimpangan yang berbias gender, tidak saja tercermin pada pandangan bahwa perempuan tidak dianggap cocok menangani pekerjaan akuntansi, tetapi tercermin pula pada rendahnya rasio gaji pekerja perempuan, dibandingkan dengan pekerja laki-laki dalam bidang akuntansi. Selain itu, terdapat pula halangan yang terselubung bagi perempuan untuk naik ke jenjang karier yang lebih tinggi (Kim, 2001; Stedham *et al.*, 2003). Dengan demikian ada ideologi gender, yakni asas yang memilihkan pekerjaan atas dasar jenis kelamin (Megawangi, 1999; Murniati,

2004) yang ikut bermain, sehingga tidak saja pekerjaan sebagai akuntan dikaitkan dengan maskulinitas, tetapi menimbulkan pula diskriminasi atas upah dan penjejaran karier yang dialami oleh perempuan.

Namun, jika gagasan para pakar tersebut dikaitkan dengan tabel 1, maka tampak hal sebaliknya, yakni ilmu maskulin, justru lebih banyak diminati oleh perempuan. Lebih-lebih jika data tersebut dihubungkan dengan budaya patriarki yang berlaku pada masyarakat Bali, ternyata secara kuantitas laki-laki digeser oleh perempuan. Padahal, sesuai dengan asas yang terkandung pada budaya patriarki, laki-lakilah yang seharusnya lebih banyak daripada perempuan. Dengan adanya kenyataan ini maka ada masalah yang menarik dikaji, *pertama*, apakah alasan maknawi yang mendorong perempuan menempuh pendidikan pada Jurusan D3 Akuntansi? *Kedua* apakah ideologi patriarki dan ideologi gender ikut berperan dalam menentukan pilihan terhadap jurusan D3 Akuntansi?

Pengkajian terhadap alasan maknawi sangat penting, mengingat bahwa dalam perspektif fenomenologi, apapun yang dikatakan dan dilakukan manusia tidak terlepas dari kondisi bagaimana aktor menafsirkan atau memahami dunianya. (Ritzer, 1989; Ritzer dan Goodman, 2004; Bogdan dan Taylor, 1993). Bertolak dari pemberlakuan budaya patriarki, maka pemaknaan yang melatarbelakangi pemilihan mereka terhadap Jurusan D3 Akuntansi, aktornya tidak hanya terletak pada mahasiswi, melainkan bisa pula pada aktor yang dominan di dalam keluarga, yakni ayah. Ayah sebagai pemimpin keluarga bisa sangat menentukan pemilihan jurusan bagi anak-anak mereka. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan yang dikaji dalam makalah ini, dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa orang mahasiswi D3 Akuntansi angkatan 2004/2005. Ada dua masalah yang

ditanyakan, yakni alasan maknawi dan keterlibatan orang tua mereka dalam menentukan pilihan kuliah pada Jurusan D3 Akuntansi. Dengan wawancara maka tergalikan data yang bersifat emik. Namun, sebagaimana dikemukakan Pelto dan Pelto (1984) data emik perlu diberikan pemaknaan secara etik sehingga melahirkan suatu paparan yang kebermaknaannya lebih tinggi, karena terkait dengan suatu bangunan teori.

Pemaknaan terhadap sesuatu tidak bisa dilepaskan dari ideologi, yakni "sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik" (Thompson, 2003). Berbagai kajian menunjukkan bahwa peran ideologi dominan yang berlaku dalam masyarakat sangat penting, tidak saja dalam pemilihan sekolah, tetapi juga dalam pengajaran. Hanya saja, orang acapkali tidak menyadarinya atau bahkan menutupinya, sehingga penerapan suatu ideologi berlangsung secara tidak disadari atau di sekolah bersembunyi di balik apa yang disebut *hidden curriculum* (Tilaar, 2003; Atmadja, 2004a). Dengan adanya gagasan ini maka kajian terhadap ideologi yang tersembunyi di balik pemilihan Jurusan D3 Akuntansi, baik yang berhubungan dengan ideologi jender dan ideologi patriarki sangat menarik. Untuk itu, perlu pendekatan yang memadai, yakni tidak semata-mata dilakukan dengan cara menggali informasi langsung pada pelaku budaya, tetapi harus pula disertai dengan usaha dekonstruksi sebagaimana yang berlaku pada pendekatan model kajian budaya. Dalam artian gejala sosiokultural harus didekonstruksi dengan mempertimbangkan jalinan berbagai aspek, yakni aspek politis termasuk di dalamnya ideologi, ekonomis, kultural, agama dan psikoanalisis. Bahkan, aspek historis tidak bisa diabaikan karena dunia kekinian berkesinambungan, berlandaskan pada dunia kelampauan, dan setiap kegiatan kebudayaan memiliki kaitan historis dengan

bagian-bagian lainnya dalam kebudayaan (Kellner, 2003; Storey, 2001; Tilaar, 2003; Tester, 2003).

#### **ALASAN MAKNAWI PEREMPUAN MEMASUKI JURUSAN D3 AKUNTANSI**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswi tentang alasan maknawi yang mendorong mereka memilih Jurusan D3 Akuntansi, begitu pula dukungan orang tua mereka untuk memasuki jurusan tersebut, ternyata cukup kompleks. Untuk lebih jelasnya alasan maknawi mereka dapat dicermati pada paparan sebagai berikut:

#### **Pendidikan Modal Akademik Meningkatkan Status Sosial**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswi, begitu pula gagasan yang ada pada orang tua mereka, menyatakan bahwa mereka memilih Jurusan D3 Akuntansi, karena mereka berharap bisa meningkatkan status sosial mereka di lingkungan keluarga maupun masyarakat, terutama setelah mereka berumah tangga. Dengan adanya temuan ini maka meminjam gagasan Bourdieu (dalam Brooks, 2002) dapat dikemukakan bahwa mahasiswi maupun orang tua mereka mendorong anak perempuannya memasuki Jurusan D3 Akuntansi, karena mereka memaknai Jurusan D3 Akuntansi mampu memberikan modal akademik sebagai sarana bagi mobilitas sosial vertikal yang menaik, yakni dari tersubordinasi ke arah kesetaraan jender atau paling tidak dari kondisi yang kurang memperoleh penghargaan menjadi lebih dihargai, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Harapan serupa itu bisa dimaklumi, mengingat bahwa secara substansial modal akademik yang diberikan oleh Jurusan D3 Akuntansi, yakni tidak saja berbentuk kognisi, tetapi juga metis. Dengan mengacu kepada Brooks (2002) metis adalah susunan luas dari keterampilan-keterampilan praktis

dan intelegensi yang diperoleh dalam merespon suatu lingkungan alam dan manusia yang terus-menerus berubah. Metis tidak hanya diajarkan guna mendapatkan kognisi dalam konteks pemahaman, tetapi menuntut pula pelatihan, misalnya lewat magang, ditambah lagi dengan pengamalan pada dunia kerja agar pemahaman berimbang dengan praksis. Perusahaan-perusahaan modern memerlukan sumber daya manusia yang tidak semata-mata memiliki kognisi, tetapi yang penting harus pula memiliki metis.

Dalam konteks inilah Jurusan D3 Akuntansi yang memberikan modal akademik maupun metis, posisinya menjadi sangat penting. Hal ini tidak semata-mata, karena dengan modal akademik yang mereka miliki, mereka bisa memasuki dunia kerja, tetapi yang lebih penting adalah mereka bisa pula mengalihkan modal akademiknya menjadi modal ekonomi, yakni dalam bentuk gaji — uang. Dengan mengacu kepada perspektif struktural bahwa dunia materi bisa menimbulkan perubahan pada struktur sosial maupun ide yang ada di baliknya (Budiman, 1989). Karena itu, pandangan mahasiswi maupun orang tua yang memasukkan anaknya ke Jurusan D3 Akuntansi adalah untuk meningkatkan status sosial, secara teoritik menjadi sesuatu yang syah adanya. Mengingat bahwa jika mereka bekerja dan memperoleh gaji, berarti mereka memiliki sumber daya materi, yakni uang. Dengan adanya uang, lebih-lebih pada masyarakat yang kuat terpengaruh oleh ideologi pasar, sebagai yang tampak pada masyarakat Bali saat ini (Atmadja, 2004), maka peluang bagi perempuan mengalami peningkatan status sosial menjadi bertambah besar, yakni paling tidak dalam bentuk perubahan pengakuan, yakni dari kondisi kurang memperoleh pengakuan menjadi diakui eksistensinya di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

### **Profesi Di Bidang Akuntansi Cocok Bagi Perempuan**

Wawancara terhadap mahasiswi menunjukkan bahwa mereka memasuki Jurusan D3 Akuntansi terkait pula dengan anggapan mereka bahwa akuntansi merupakan bidang yang dianggap cocok bagi kaum perempuan. Apa yang dikemukakan oleh mahasiswi sepertinya tidak sejalan dengan sudut pandang yang menyatakan bahwa akuntansi adalah bidang ilmu yang maskulin, karena menuntut hal yang rasional, logis serta dapat dianalisis, (Lehman, 1992; Raffield and Coglitore, 1992; Hines, 1992). Ketidaksesuaian ini tidak perlu dilawankan, bahkan bisa dipahami maupun diakomodasikan, karena akuntansi sebagai sebuah disiplin ilmu, berhubungan pula dengan hitung menghitung yang membutuhkan kecermatan, ketelitian, kesabaran serta kehati-hatian. Hal ini lazim disebut sebagai pekerjaan klerikal (Kirkham, 1992; Kirkham and Loft, 1993).

Pekerjaan-pekerjaan klerikal membutuhkan sifat-sifat yang selama ini dianggap melekat dalam diri perempuan. Anggapan ini tidak lepas dari peranan tradisional akuntansi yang semula merupakan alat bagi para pedagang dalam mengelola bisnisnya. Ketika perdagangan masih sederhana dan hanya melibatkan kalangan perseorangan, akuntansi tidak lebih dari sekedar metode pencatatan untuk mencatat laba maupun rugi aktivitas bisnisnya (Kirkham and Loft, 1993). Meskipun dewasa ini akuntansi telah berkembang jauh melampaui aktivitasnya di masa lampau, pandangan masyarakat seringkali tidak berubah. Masyarakat seringkali menganggap akuntansi sebagai metode pencatatan aktivitas bisnis semata. Dengan demikian akuntansi, di satu sisi memang menuntut hal yang mencirikan maskulinitas, namun di sisi yang lain karena akuntansi mencakup pula pekerjaan-pekerjaan klerikal, maka aspek femininitasnya tidak bisa diabaikan.

Bertolak dari gagasan tersebut maka pemaknaan mahasiswi D3 Akuntansi bahwa akuntansi cocok bagi perempuan, ternyata ada pembenarannya. Namun, jika dicermati, maka pemaknaan mereka bisa dikatakan bersifat reduksi. Karena, akuntansi sepertinya dimaknai dengan klerikal. Padahal klerikal hanya merupakan aspek kecil dari ruang lingkup pekerjaan yang tercakup dalam keakuntansian. Sebagai sarana utama dalam berkomunikasi di dunia bisnis (Scott, 2003) akuntansi telah jauh berkembang melampaui fungsinya di masa-masa terdahulu yang semata-mata menjalankan fungsi klerikalnya. Namun, kemunculan pemaknaan yang reduktif tentu bisa dimaklumi, mengingat bahwa latar belakang pendidikan yang mereka tempuh adalah D3. Peluang kerja keluaran D3 memang lebih banyak pada posisi menengah ke bawah, termasuk klerikal. Sedangkan untuk posisi atas, misalnya manajer atau partner dalam institusi akuntan publik, lebih banyak diklaim oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan akuntansi strata satu, bahkan sering pula dilengkapi dengan pelatihan keprofesionalan tingkat lanjut.

Perempuan yang menangani bidang klerikal tidak saja berhubungan dengan pekerjaan hitung menghitung, tetapi juga terkait dengan komunikasi. Sebagaimana terlihat di bank misalnya —Bank Mandiri Singaraja, *teller* dan staf lain yang terkait dengannya, hampir seluruhnya— sekitar 6 orang adalah perempuan. Kondisi ini ada kaitannya dengan keunggulan perempuan dalam memberikan pelayanan maupun berkomunikasi. Keunggulan ini dapat mereka manfaatkan dalam pekerjaan di bidang akuntansi terutama apabila dikaitkan dengan proses komunikasi dengan klien, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi akuntansi. Sebagaimana yang dikemukakan Lehman (1992) perempuan haruslah dapat bersikap layaknya perempuan (*look like a lady*), berpenampilan

memikat serta menonjolkan aspek keperempuanannya dalam pekerjaan di bidang ini. Sifat-sifat ini dianggap sesuai dengan perempuan yang pada hakekatnya merupakan makhluk melayani.

Keunggulan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan klerikal dan kemampuan berkomunikasi mendapat pembenaran dari sudut pandang biologis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pease dan Pease (2004) perempuan dikatakan memiliki kemampuan yang berbeda dalam memanfaatkan bagian *hemisphere* otaknya dengan laki-laki. Kemampuan ini menyebabkan perempuan lebih mampu melakukan banyak hal dalam satu waktu dan lebih unggul dalam pembuatan laporan keuangan, serta aktivitas-aktivitas berulang lainnya dibandingkan dengan pria. Selain itu perempuan juga unggul dalam kemampuan verbal yang merupakan kemampuan dasar dalam berkomunikasi. Dengan kelebihan secara biologis inilah perempuan lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat klerikal. Hal ini dikarenakan pekerjaan klerikal merupakan pekerjaan yang terdiri dari aktivitas mencatat, mengikhtisar, menjumlah, serta aktivitas lain yang senantiasa berulang.

### **Waktu Studi Pendek, Investasi Lebih Kecil, Peluang Kerja Luas**

Pekerjaan-pekerjaan klerikal dilakukan di setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Kondisi ini menimbulkan implikasi bahwa pendidikan akuntansi dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk mencari pekerjaan. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa akuntansi merupakan bidang pekerjaan yang fleksibel, karena jasanya dibutuhkan oleh setiap organisasi yang melakukan aktivitas pencatatan keuangan. Aktivitas ini dapat berupa pencatatan aktivitas bisnis bagi entitas bisnis maupun pengelolaan keuangan bagi instansi pemerintah. Luasnya kebutuhan akan pekerja di bidang klerikal, dengan

sendirinya banyak menyerap tenaga perempuan. Fleksibilitas yang melekat pada akuntansi menambah daya tarik mahasiswi untuk mengikuti pendidikan pada Jurusan D3 Akuntansi. Tenaga mereka bisa ditampung pada instansi pemerintah maupun swasta.

Selain itu, mereka melihat pula bahwa rentangan waktu pada pendidikan D3 lebih singkat, dibandingkan dengan jenjang pendidikan S1. Hal ini berarti, tidak saja waktu yang dihabiskan lebih singkat, tetapi terkait pula dengan modal yang diinvestasikan. Investasi modal menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan modal yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan S1 Kependidikan misalnya. Program S1 menuntut rentangan waktu lebih lama, yang sekaligus berarti memerlukan investasi yang lebih besar pula. Pilihan pekerjaan yang mereka miliki juga terbatas, hanya menjadi guru. Jadi, peluang kerja yang lebih luas mengandung makna bahwa jurusan Pendidikan D3 Akuntansi memiliki nilai sosial dan ekonomi lebih tinggi, daripada profesi kependidikan. Kesemuanya ini sangat penting, karena ikut mendorong perempuan memilih masuk pada Jurusan D3 Akuntansi.

Apabila paparan di atas dikaitkan dengan gagasan Fromm (1996), maka apa yang dikemukakan oleh para mahasiswi D3 Akuntansi, tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan yang paling hakiki tentang keberadaan manusia sebagai *homo esperans*, yakni manusia sebagai makhluk yang selalu berharap. Artinya, apapun yang mereka lakukan, selalu terkait dengan sesuatu harapan, yakni harapan akan kehidupan yang lebih baik, harapan untuk memiliki apa yang lebih bermakna bagi kehidupannya. Dengan berpegang pada gagasan tersebut maka apapun alasan maknawi yang mendorong mahasiswi maupun orang tua mereka menyekolahkan anaknya pada Jurusan D3 Akuntansi, pada hakikatnya adalah karena mereka berharap bisa lebih daripada sebelumnya, yakni lebih mudah

dan lebih cepat mendapatkan pekerjaan yang sekaligus berarti kehidupan mereka pun menjadi lebih baik pula. Jadi, apa yang dikemukakan Robinson (1986) bahwa pendidikan dapat dilihat, antara lain, sebagai suatu persiapan bagi struktur pekerjaan, berlaku pula pada pemilihan mahasiswi terhadap Jurusan D3 Akuntansi. Harapan mendapatkan pekerjaan memang sangat penting, mengingat seperti dikemukakan Marx (dalam Magnis-Suseno, 1999) bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk kerja. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa kerja memberikan peluang bagi manusia untuk mengaktualisasikan dirinya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

#### **DEKONSTRUKSI IDEOLOGI DI BALIK PEMILIHAN JURUSAN D3 AKUNTANSI**

Apabila dicermati alasan maknawi yang disampaikan oleh mahasiswi maupun orang tua, tentang latar belakang mereka menyekolahkan anak perempuan pada Jurusan D3 Akuntansi, yakni dalam rangka memberikan modal akademik, secara faktual sangat menggembirakan. Ideologi patriarki yang kuat pengaruhnya pada masyarakat Bali, sepertinya tidak ada. Namun, anggapan ini harus dicermati secara hati-hati, mengingat bahwa suatu ideologi yang terinternalisasi secara kuat dalam masyarakat, sering kali menyusup dalam praktek-praktek sosial, tanpa disadari oleh aktornya. Lebih-lebih kalau ideologi tersebut menguntungkan pihak yang berkuasa, yakni laki-laki, maka ideologi bisa dipakai topeng untuk menutupi realitas (O'neil, 2001; Thompson, 2003; Piliang, 2004; Atmadja, 2004a). Dalam konteks ini maka seperti dikemukakan Derrida (dalam Spivak, 2003; Norris, 2003; Beilharz, 2002) perlu ada dekonstruksi, yakni pembongkaran terhadap ideologi yang ada di balik realitas

sosial sehingga apa yang tidak tampak menjadi terpahami secara jelas.

### **MODAL AKADEMIK MENETRALISIR IDEOLOGI PATRIARKI**

Bertolak dari asas dekonstruksi maka niat baik orang tua menyekolahkan anak perempuannya ke Jurusan D3 Akuntansi, begitu pula anak perempuannya menerimanya dengan senang hati, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kuatnya pemberlakuan ideologi patriarki pada masyarakat Bali. Ideologi patriarki menimbulkan implikasi bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat Bali adalah patriarkat atau sistem *purusa* (Pudja, 1997). Jika laki-laki kawin, maka mereka akan membawa istrinya ke dalam lingkungan keluarganya. Begitu pula, adat menetap setelah kawin mengikuti pola patrilokal atau *virilokal*, yakni mereka tinggal di lokalitas di sekitar orang tua suaminya (Koentjaraningrat, 1990). Menurut Ursula Sharma (dalam Azwar, 2001) sistem kekeluargaan patrilineal-patrilokal dengan pola pembagian kerja domestik-publik, mengakibatkan pula perempuan semakin tertindas hak-haknya pada lingkungan keluarga suaminya. Hal ini mengharuskan perempuan mampu beradaptasi untuk mengurangi penindasan sekaligus untuk menarik simpati, agar mereka bisa diterima pada lingkungan keluarga suaminya. Begitu pula, mereka harus bekerja keras pada sektor domestik, bahkan apabila memungkinkan ikut terjun ke sektor publik, dengan cara menangani bidang nafkah tertentu guna menambah daya ekonomi dan daya simpati di kalangan anggota keluarga suaminya.

Istri yang gagal beradaptasi, apalagi malas bekerja, maka sebagaimana yang lazim berlaku pada masyarakat Bali, mertuanya sering berujar, "*Nyeret teken teken tingkang-tingkang dogen nyai dini!*" Artinya, "*Makan dan buka-buka paha saja kerjamu di sini ya!*". (Artadi, 1993). Jika

didekonstruksi tampak bahwa ucapan tersebut tidak saja terkait dengan kemalasan, tetapi bertalian pula dengan kemiskinan perempuan akan sumber daya ekonomi. Dalam sistem keluarga patriarkat, anak laki-laki adalah ahli waris harta benda yang ditinggalkan orang tua maupun leluhurnya. Akibatnya, perempuan yang masuk ke dalam keluarga suaminya tidak memiliki basis ekonomi sebagai sarana *bargaining power* sehingga peluang mereka untuk disubordinatkan oleh suaminya menjadi sangat besar (Sanderson, 1993). Apalagi dengan adanya pembagian peran jender, dimana perempuan identik dengan sektor domestik, sedangkan pria dengan sektor publik, sangat merugikan perempuan. Sebab pemisahan tersebut tidak berkomplementer, tapi berstrata, yakni sektor publik lebih tinggi nilainya daripada sektor domestik, walaupun curahan tenaga dan waktunya amat panjang.

Masyarakat Bali mencoba mengatasi masalah ketimpangan status istri di mata suami maupun keluarganya, dengan cara melembagakan sistem *tadtadan*, yaitu orang tua memberikan harta bawaan kepada anak perempuannya. Dalam masyarakat agraris harta yang paling berharga adalah tanah, karena tanah adalah sumber kehidupan, lokalitas hunian, dan tempat mereka dikuburkan, sehingga mereka memiliki keterikatan sosioreligius terhadap tanah (Atmadja, 1998). Karena itu, orang tua yang berkecukupan lazim memberikan anak perempuannya *tadtadan* berbentuk tanah sawah dan/atau tegalan. Dengan adanya *tadtadan* timbul basis ekonomi, sehingga suami, begitu pula anggota kerabatnya, diharapkan lebih menghargai perempuan (istri) yang masuk ke lingkungan keluarganya.

Modernisasi menyebabkan tanah kehilangan nilai sosioekonomi dan nilai religius-magisnya. Akibatnya, orangtua tidak lagi memberikan anak perempuannya



*tadtadan* tanah, melainkan semakin banyak orangtua pada masyarakat Bali memberikan bekal berbentuk pendidikan formal - tercermin dalam ijazah (Atmadja dan Atmadja, 2005). Sebagaimana halnya dengan tanah, bekal ijazah diharapkan pula bisa memberikan pendapatan, yakni dari hasil kerja menggunakan ijazah mereka. Dengan demikian, *tadtadan* tradisional berbentuk tanah, dewasa ini telah bergeser menjadi *tadtadan* modern, yakni ijazah.

Bertitik tolak pada alur berpikir seperti itu maka kegairahan orang tua menyekolahkan anak perempuannya pada Jurusan D3 Akuntansi, dapat pula dipandang sebagai strategi mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari adanya ideologi patriarki. Dalam konteks ini seperti dikemukakan Bourdieu (dalam Brooks, 2002; Chaney, 2004), dengan menyekolahkan anak perempuannya, orang tua ingin membekali anak perempuan, yakni dalam bentuk modal yang sangat berharga berupa modal akademik (gelar yang tepat). Bahkan, bisa pula disebut modal kultural, karena apa yang mereka miliki terkait dengan pengetahuan tentang suatu bidang sesuai dengan jurusannya, yakni akuntansi. Pemberian modal tersebut sangat penting, karena dia dapat dialihkan menjadi modal ekonomi, berbentuk pendapatan atau gaji. Hal ini juga sesuai pula dengan hasil wawancara terhadap mahasiswi, bahwa motivasi mereka menempuh pendidikan pada Jurusan D3 Akuntansi, tidak sekedar untuk mendapatkan modal akademik yang disimbolkan dengan ijazah, tetapi yang lebih penting adalah untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan yang sekaligus berarti terkait dengan kepemilikan modal ekonomi.

Kepemilikan aneka modal tersebut berguna pula bagi peningkatan status sosial perempuan, karena sebagaimana yang diharapkan oleh para mahasiswi, begitu pula orangtuanya, bahwa kehadiran mereka di

tengah-tengah keluarga suaminya, kelak tidak lagi hanya bermodalkan tubuh, tetapi juga berbekalkan modal akademis, modal kultural dan modal ekonomi. Begitu pula, mereka tidak lagi mutlak bergantung kepada suaminya, tetapi justru berkontribusi bagi kehidupan rumah tangganya, yakni berbentuk masukan finansial, material, dan ideasional. Bersamaan dengan itu, mereka berpeluang pula melakukan adaptasi pada sistem kepolitikan berwujud *bargaining power*, yakni "suatu kemampuan untuk menawar agar mendapatkan yang lebih baik" (Hardy, 1998), tercermin pada perlakuan tidak diremehkan oleh suami dan kerabatnya. Begitu pula, mereka lebih berpeluang dalam pengambilan keputusan mengenai masalah pada lingkungan keluarganya.

Gagasan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Megawangi (1999) bahwa perempuan tersubordonasi oleh laki-laki, antara lain, karena mereka miskin akan kepemilikan sumber daya. Hal ini berarti, jika mereka memiliki sumber daya, maka peluang untuk mengurangi kesubordinasian tentu menjadi lebih besar. Bahkan bisa pula terjadi, dengan bekerja pada sektor publik, timbul dampak psikologis, yakni perempuan lebih mudah mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan personal, dan kompetisi (Rowatt dan Rowatt, 1990). Pada akhirnya, kesemuanya itu diharapkan membawa penyesuaian pada tataran superstruktur ideologi, yakni agama dan nilai-nilai budaya, yang semula menekankan pada tataran hubungan antar individu yang bercorak hirarkis – pria lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, berubah ke arah suatu hubungan sosial yang menghargai kesetaraan jender (Megawangi, 1999).

Pengalihan ijazah menjadi modal politik atau paling tidak bisa mengurangi tekanan kekuasaan suami atas istrinya, apalagi jika dia berhasil menguasai

suaminya, tentu memberikan kepuasan tersendiri bagi perempuan. Lebih-lebih jika mereka memiliki pula kekuasaan di lingkungan kerja mereka. Mengingat, bahwa dengan memiliki ijazah diploma, perempuan dapat mengisi posisi pada level menengah pada perusahaan atau instansi tempatnya bekerja. Jika perempuan memiliki kapabilitas yang memadai, seiring dengan pengalaman yang ada padanya, bukan tidak mungkin mereka dapat menduduki posisi-posisi puncak. Pada posisi ini, perempuan dapat memiliki kekuasaan untuk mengatur orang-orang yang menjadi bawahannya.

Kepemilikan kekuasaan sangat penting bagi manusia. Hal ini tidak semata-mata karena kekuasaan berimplikasi pada peningkatan imbalan ekonomi, tetapi bisa pula mendatangkan imbalan sosial yang lebih besar, yakni dihormati dan dipatuhi oleh orang lain. Karena itu, seperti dikemukakan Friedrich Nietzsche (dalam Jackson, 2003; Arifin, 1987) bahwa kehendak berkuasa menyatu dengan manusia. Bahkan secara disadari maupun tidak disadari perilaku manusia seringkali digerakkan oleh keinginan untuk berkuasa. Sejalan dengan itu berarti, jika perempuan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lalu mengakibatkan mereka memiliki daya kuasa yang lebih banyak, maka dengan sendirinya akan menimbulkan kepuasan, karena kehendak mereka berkuasa tersalurkan secara baik.

#### **PENGIRITAN WAKTU DAN BIAYA: DISKRIMINASI TERSEMBUNYI**

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perempuan maupun orang tuannya memilih Jurusan D3 Akuntansi adalah pengiritan waktu dan investasi dalam pendidikan. Hal ini berkaitan erat dengan adanya fakta, yakni masa studi mereka lebih singkat jika dibandingkan dengan S1, maka anak perempuan bisa mengirit waktu studi yang

sekaligus berarti, biaya pendidikan yang dikeluarkan juga bisa ditekan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, peluang untuk bekerja dan menikah menjadi lebih cepat pula. Jika mereka telah bekerja, apalagi telah menikah, maka sesuai dengan budaya patriarki yang berlaku pada masyarakat Bali, maka ketergantungan anak perempuan kepada orang tua secara otomatis menjadi berkurang, bahkan menjadi terputus.

Bertolak dari sudut pandang budaya, sosial, dan ekonomi, prinsip ini jelas sangat menguntungkan baik bagi keluarga maupun perempuan yang menempuh pendidikan pada Jurusan D3 Akuntansi. Namun, jika didekonstruksi, secara disadari maupun tidak disadari ada perlakuan yang berbeda, bahkan bersifat diskriminasi dalam pemberian peluang pendidikan antara anak laki-laki dengan perempuan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa berdasarkan wawancara terhadap mahasiswi justru banyak orang tua mereka yang memprioritaskan saudara laki-lakinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Jadi, anak perempuan dibatasi pada D3, sebaliknya anak laki-laki lebih diberikan kebebasan, yakni sampai ke S1. Gejala seperti ini memang tidak hanya berlaku di Bali, melainkan umum berlaku di Indonesia. Karena itu, tidak mengherankan jika keluaran Diploma untuk anak perempuan, lebih banyak daripada anak laki-laki (Azkiyah, 2002; Arivia, 2002).

#### **KLERIKAL: PENJENDERAN SECARA TIDAK DISADARI**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hines (1993) dalam sudut pandang *mainstream* akuntansi yang tercermin dalam praktek akuntansi dunia adalah semata-mata rasional, logis dan dapat dianalisis. Perhitungan dan pengukuran akuntansi menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan yang rasional, bertujuan untuk menciptakan efisiensi serta maksimalisasi keuntungan.

Akuntansi kemudian menjadi selalu rasional, materialistik serta reduksionis yang dalam perspektif budaya, filsafat, psikologis serta spiritual erat dikaitkan dengan sifat-sifat maskulin. Bertolak dari sudut pandang ini, segala ketimpangan jender yang menimpa perempuan dalam bidang akuntansi dianggap sebagai suatu kewajaran. Akuntansi sebagai disiplin ilmu yang maskulin senantiasa menentang sifat-sifat feminim. Karena itu, kemunculan pandangan yang berbias jender, di mana perempuan sebagai makhluk feminim dianggap tidak pantas bekerja dalam bidang akuntansi menjadi sah adanya.

Dalam dunia akuntansi sebutan akuntan dan *clerk* memiliki makna yang berbeda (Kirkham and Loft 2003). Akuntan bermakna sebuah pekerjaan profesional, membutuhkan kapabilitas keilmuan yang tinggi serta sikap-sikap yang mendukung keprofesionalisme. Sedangkan *clerk*, merupakan pekerjaan pendukung dalam bidang akuntansi, tidak memerlukan kapabilitas keilmuan yang tinggi serta hanya melakukan jenis pekerjaan yang berulang. Akuntan dikotakan sebagai pekerjaan maskulin, sedangkan *clerk* merupakan pekerjaan yang feminim. Selain mengisi pekerjaan klerikal perempuan juga banyak menduduki posisi-posisi penjualan pada kantor-kantor akuntan publik (Pease dan Pease, 2004).

Dengan berpegang pada gagasan tersebut, begitu pula dengan melihat latar belakang pendidikan mereka, yakni D3, maka ada beberapa permasalahan yang memerlukan pencermatan, yakni *pertama*, peluang mereka menjadi akuntan profesional sangat kecil. Sebab, secara akademik mereka memang direproduksi menjadi manusia yang memiliki metis guna mengisi lowongan kerja pada tingkat menengah yang dengan mudah bisa dikaitkan dengan klerikal. *Kedua*, akuntan profesional adalah miliknya S1, atau bisa pula S2 Jurusan

Akuntansi dengan berbagai pelatihan keprofesionalan lanjutan. *Ketiga*, sudut pandang *mainstream* mengkategorisasikan akuntan sebagai pekerjaan maskulin, bukan feminim. Bertolak dari kenyataan ini maka perempuan keluaran D3 Akuntansi secara otomatis lebih besar peluangnya menjadi klerikal, tidak saja karena klerikal adalah bidangnya, tetapi juga karena menjadi akuntan profesional tidaklah mungkin. Karena itu, orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Jurusan D3 Akuntansi, secara disadari maupun tidak disadari, mereka melakukan penjenderan terhadap anak perempuannya. Begitu pula anak perempuan yang secara sukarela maupun karena mengikuti anjuran orang tuanya masuk ke Jurusan D3 Akuntansi, secara disadari maupun tidak disadari, juga melakukan penjenderan atas dirinya sendiri. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya, secara struktural, sebagaimana yang berlaku di dalam masyarakat, dimana perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, maka di dunia kerja, dimana perempuan sebagai klerikal, secara otomatis juga berada di bawah subordinasi laki-laki - posisi akuntan milik laki-laki. Dengan demikian perempuan yang memasuki Jurusan D3 Akuntansi tidak saja mengalami penjenderan, tetapi juga tetap berada pada kondisi tersubordinasi oleh laki-laki.

#### **MODAL TUBUH DAN PEREMPUAN SEBAGAI OBYEK LIBIDO**

Tingginya jumlah perempuan pada bidang klerikal maupun posisi-posisi penjualan pada kantor-kantor akuntan publik, seperti dikemukakan Pease dan Pease (2004), berkaitan erat dengan anggapan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan klerikal serta berkomunikasi dengan lebih baik. Perempuan dikatakan memiliki kesabaran, ketekunan serta kehati-hatian yang menyebabkan mereka dapat mengerjakan pekerjaan klerikal

dengan sedikit kesalahan. Di bidang komunikasi perempuan memiliki kemampuan verbal yang lebih unggul daripada laki-laki (Pease dan Pease, 2004). Oleh karena itu, komunikasi dengan klien atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi akuntansi umumnya dilakukan oleh perempuan.

Anggapan akan keunggulan perempuan di bidang klerikal dan komunikasi sepintas dapat dilihat sebagai hal yang menguntungkan perempuan. Namun apabila didekonstruksi, anggapan ini dapat menjadikan perempuan terkungkung dalam dua jenis pekerjaan itu saja tanpa memiliki peluang untuk meningkatkan kariernya. Perempuan yang hendak naik ke posisi yang lebih tinggi dalam bidang akuntansi haruslah memiliki 'kepribadian yang maskulin' (Kenter dalam Lehman, 1992). Perpindahan kepribadian dari feminin ke maskulin diperlukan oleh perempuan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi.

Namun, perempuan yang telah dapat merubah kepribadian dari feminin ke maskulin, tidak dengan serta merta dapat meraih posisi yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan pada kasus Ann Hopkins, seorang manajer pada Kantor Akuntan Publik (Weisel, 1991; Knapp, 2001) Price Waterhouse. Kasus ini menjadi sebuah paradoks akan sebuah kesuksesan perempuan untuk mengubah kepribadian femininnya menjadi kepribadian maskulin. Ann Hopkins gagal meraih posisi partner justru karena dianggap terlalu maskulin bagi seorang perempuan. Dia diharapkan mengubah penampilannya dengan 'berjalan dengan lebih feminin, berbicara lebih feminin, dan mempergunakan perhiasan serta *make up*' (Weisel, 1991). Pesan dalam kasus ini adalah perempuan harus mengadopsi maskulinitas dalam pekerjaannya sekaligus tetap feminin sesuai kodrat keperempuanannya. Sebuah posisi yang tidak dituntut dari seorang laki-laki pada profesi ini.

Keharusan perempuan untuk selalu tampil cantik merupakan harga yang dibayar oleh perempuan untuk dapat sukses secara profesional serta sudah menjadi bagian dari stereotipe perempuan (Wolf, 1991). Sebuah paradoks ketika perempuan dituntut profesional, namun sekaligus tidak boleh meninggalkan peran tradisionalnya, yakni menjaga daya tarik secara seksual. Pengamatan menunjukkan bahwa keharusan perempuan untuk tampil cantik, tidak saja berlaku di kalangan mereka yang mencapai jenjang karier akuntan publik profesional seperti pada kasus Ann Hopkins, tetapi juga berlaku pada perempuan klerikal. Mereka pun harus tampak cantik dan menarik, lebih-lebih bagi klerikal yang menempati ruang yang secara langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.

Dengan berpegang pada gagasan Synnott (2003) kondisi seperti ini menandakan bahwa ada penggunaan modal tubuh untuk kepentingan bisnis. Hal ini tentu bisa dimaklumi, mengingat *libido* atau hasrat seks merupakan faktor penggerak utama bagi perilaku manusia. Dalam konteks ini perempuan adalah obyek *libido* bagi laki-laki (Marcuse, 2004; Stevenson dan Haberman, 2001). Karena itu, perempuan yang memiliki modal tubuh yang cantik, dengan sendirinya akan memberikan daya tarik tambahan kepada lembaga yang menggunakannya. Jadi, disadari maupun tidak disadari, keharusan perempuan untuk berpenampilan cantik, pada dasarnya merupakan bentuk eksploitasi modal tubuh perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu lembaga. Perempuan tidak menolaknya, bahkan dengan senang hati melakukannya, karena sejak kecil mereka telah dibiasakan memposisikan dirinya sebagai obyek *libido* dan sekaligus menggunakan modal tubuhnya guna menambah daya tarik bagi pria (Atmadja, 2004a).

Keharusan perempuan tampak cantik, menimbulkan implikasi mereka meng-

alokasikan sebagian pendapatannya untuk merawat kecantikannya. Sebagaimana dikemukakan Wolf (1991), praktek perawatan modal tubuh dapat menghabiskan seperempat dari pendapatan perempuan. Pendapatan yang mereka terima merupakan modal ekonomi yang tentunya bisa digunakan untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Namun, karena kebutuhan meningkatkan modal tubuh cukup besar, maka peningkatan keprofesionalan menjadi tertinggal. Akibatnya, mereka tetap saja menduduki posisi sebagai klerikal, sehingga kesetaraan gender yang diharapkan pada lingkungan kerja, menjadi sulit terwujud. Kondisi seperti ini tidak saja terjadi di lingkungan kerja mereka, tetapi bisa pula pada lingkungan keluarganya. Mereka tetap saja disubordinasi oleh laki-laki atau suaminya. Pendapatan yang mereka terima tidak mampu berperan sebagai basis ekonomi bagi emansipasi perempuan. Pendapatan mereka mengecil karena dikurangi dengan pengeluaran untuk menambah daya tarik modal tubuh. Dengan demikian tidak mengherankan jika perempuan tetap saja tersubordinasi oleh laki-laki, walaupun mereka bekerja dan berpenampilan sangat cantik dan menarik.

#### **KENDALA SOSIAL BUDAYA IKUT MEWARNAI**

Budaya patriarki yang dianut masyarakat Bali seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang inferior. Perempuan seringkali digambarkan sebagai pihak yang lemah, emosional serta hanya merupakan objek seksual bagi laki-laki (Atmadja, 2004a). Pada masyarakat Bali dikenal beberapa sebutan bagi perempuan yang dapat mencerminkan bahwa perempuan adalah makhluk emosional dan lemah. Pemakaian nama *Luh* yang secara harfiah berarti air mata (Palguna, 2002) di depan nama seseorang mencerminkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah

serta emosional. Selain *luh*, di depan nama perempuan juga seringkali mendapatkan tambahan kata *Ni* (misalnya perempuan bernama *Ni Luh Ketut Satri*, atau *Ni Wayan Madri*) Kata-kata seperti ini dapat memberikan sosialisasi gender pada perempuan. Mereka tidak saja disadarkan akan dirinya sebagai makhluk feminim, tetapi juga dituntut agar menempatkan dirinya pada peran gender sebagaimana yang dilembagakan pada kebudayaan mereka (Synnot, 2003).

Selain lekat dengan berbagai sifat yang telah menjadi stereotipnya, perempuan juga mendapat hambatan dari tanggung jawabnya terhadap aktivitas domestik keluarga. Dalam posisi ini perempuan memiliki kewajiban untuk merawat anak dan melayani suami. Pada masyarakat Bali, hal ini masih ditambah lagi dengan adanya kewajiban menyelenggarakan ritual keagamaan. Berbagai ritual keagamaan di Bali membutuhkan perempuan sebagai pelaku utamanya. Hal ini sangat menyita waktu perempuan dan menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan laki-laki pada pekerjaan-pekerjaan audit yang membutuhkan konsentrasi penuh, waktu yang lama, serta mengunjungi tempat-tempat yang jauh (Gildea dalam Lehman, 1992).

Kalaupun ada perempuan yang meraih posisi bagus dalam dunia akuntansi, ketimpangan yang berlatarkan ideologi gender maupun ideologi patriarki tetap ada. Hal ini tercermin misalnya pada strata pengajian, di mana perempuan umumnya mendapat gaji yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Begitu pula perempuan sulit menduduki jenjang karier yang lebih tinggi (Lehman, 1992; Larkin, 1997; Stedham *et al.*, 2003). Meskipun terdapat banyak perempuan yang masuk pada pekerjaan-pekerjaan di bidang akuntansi, namun hanya sedikit yang dapat meraih posisi manajer atau partner pada kantor akuntan publik (Brazelton, 1998).

Dengan demikian, meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan akuntansi, apalagi jika mereka hanya berlatarkan pendidikan D3, tidak akan berdampak banyak pada kesetaraan jender pada bidang akuntansi. Hal ini sangat terkait dengan kendala sosial budaya pada masyarakat patriarkis yang senantiasa memomorduakan perempuan. Begitu pula pemberlakuan ideologi jender telah mengkotakkan pekerjaan mana yang baik untuk perempuan, dan sebaliknya pekerjaan mana yang baik untuk laki-laki.

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa jumlah perempuan yang memasuki Jurusan D3 Akuntansi lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari alasan maknawi yang melatarbelakanginya, yakni Jurusan D3 Akuntansi dianggap mampu memberikan modal intelektual dalam waktu yang relatif singkat. Dengan modal tersebut perempuan bisa memasuki lapangan pekerjaan, guna mempertukarkan modal intelektualnya dengan modal ekonomi. Pertukaran ini tidak saja memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan modal ekonomi, yakni gaji, tetapi memberikan pula kemungkinan untuk mendapatkan modal politik, sehingga daya tawar kekuasaan mereka pada lingkungan keluarga, terutama setelah mereka berumah tangga menjadi lebih besar.

Namun, jika didekonstruksi apa yang tampak ideal, tidak bisa dilepaskan dari ideologi patriarki yang sangat kuat pengaruhnya pada masyarakat Bali. Ideologi patriarki menimbulkan implikasi adanya sistem kekerabatan patrilineal dan pola menetap setelah menikah yang bersifat patrilokal. Kondisi ini mengakibatkan perempuan terdominasi dan terhegemoni oleh suaminya. Untuk menetralsir dampak

yang tidak diinginkan dari ideologi patriarki, maka orang tua memberikan bekal dalam bentuk modal intelektual. Hanya saja, seringkali mereka diarahkan untuk menempuh pendidikan dalam masa yang pendek. Sebaliknya, sering terjadi bahwa anak laki-laki lebih diberikan keleluasaan untuk memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S1. Maka di balik pemberian peluang kepada perempuan untuk memasuki D3, secara disadari maupun tidak disadari terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Dengan modal intelektual D3 Akuntansi perempuan memang lebih mudah memasuki pasar kerja. Namun, pada dunia pekerjaan ideologi jender berlaku secara kuat. Karena itulah sulit bagi perempuan, apalagi mereka yang hanya memiliki modal intelektual D3 untuk menduduki posisi tinggi dalam bidang akuntansi. Mereka telah dikotakkan pada bidang akuntansi yang terkait dengan peran jender, yakni klerikal. Sebaliknya, akuntan dikotakkan sebagai pekerjaan laki-laki. Begitu pula akuntansi dianggap sebagai disiplin ilmu maskulin. Pola berpikir seperti ini mengesyahkan perempuan ke posisi klerikal, sebaliknya laki-laki ke posisi akuntan. Dalam bidang klerikal perempuan tidak saja diharapkan mampu bekerja secara baik, tetapi sering pula dituntut modal tambahan, yakni modal tubuh harus cantik dan menarik. Tuntutan ini berkaitan erat dengan budaya patriarki, di mana perempuan tidak saja dianggap lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki, tetapi sering pula diposisikan sebagai obyek *libido* laki-laki. Perempuan menerimanya, karena sejak kecil mereka telah disosialisasikan untuk meposisikan diri sebagai obyek *libido* dengan cara meningkatkan kualitas modal tubuh, dan sekaligus juga taat pada peran jender.

## REFERENSI

- Abdullah, Irwan. (1997). "Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan". Dalam Irwan Abdullah ed. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman: 3-28.
- Arifin, C. (1987). *Kehendak untuk Berkuasa Friedrich Nietzsche*. Jakarta: Erlangga.
- Arivia, Gadis. (2002). "Kebijakan Publik dalam Pendidikan: Sebuah Kritik dengan Perspektif Gender". *Jurnal Perempuan*. No. 23 Tahun 2002.
- Atmadja, Nengah Bawa. (1998). *Memudarnya Demokrasi Desa: Pengelolaan Tanah Adat, Konversi dan Implikasi Sosial Dan Politik Di Desa Adat Julah Buleleng, Bali* (Disertasi Antropologi yang tidak diterbitkan pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia).
- Atmadja, Nengah Bawa. (2004). *Kearifan Lokal dan Agama Pasar*. (Makalah disampaikan pada matrikulasi Program S2 Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar).
- Atmadja, Nengah Bawa. (2004a). *Pembentukan Identitas Gender dalam Keluarga dan Sekolah*. (Makalah disampaikan dalam rangka Sosialisai Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan di Kabupaten Buleleng, Kamis-Jumat/ 30-31 Desember 2004).
- Atmadja, N.B dan Anantawikrama T. Atmadja, (2005). "Dekonstruksi Alasan Maknawi Wanita Bali Menjadi Guru dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Gender". *Jurnal Kajian Budaya*. Nomor 3. Vol. 2 Januari 2005.
- Azkiyah. Nurul. (2002). "Keterkaitan Pendidikan Formal Perempuan dan Dunia Pembangunan". *Jurnal Perempuan*. No.23 Tahun 2002.
- Beilharz. Peter. (2002). *Teori-teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. [Penerjemah; Sigit Jatmiko]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhasin, K. (1996). *Menggugat Patriarki Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Penerjemah Nug Katjasungkana. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Bhasin, K. (2002). *Memahami Gender* [Penerjemah; Moch. Zuki Hussein]. Jakarta: Teplok Press.
- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor. (1993). *Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian)*. [Penerjemah: A Khozin Afandi]. Surabaya: Usaha Nasional.
- Brazelton, Julia K. (1998). "Implication for Woman in Accounting: Some Preliminary Evidence Regarding Gender Communication". *Issues in Accounting Education*. Vol. 13, No. 3, pp. 509.
- Brooks, David. (2002). *Bobos in Paradise. Surga Para Borjuis Bohemian*. Penerjemah: A. Asnawi. Yogyakarta: Ikon Terlitera.
- Budiman, A. (1989). *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Chaney, David. (1996). *Lifestyle. Sebuah Pengantar Komprehensif*. Penerjemah Nuraeni. Yogyakarta: Jalasutra.

- Endraswara, S. (2002). *Seksologi Jawa*. Yogyakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Fromm, Erich. (2002). *Cinta Seksualitas Matriarki Gender*. Penerjemah Pipit Maizer. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fromm, Erich. (1987). *Memiliki dan Menjadi, Tentang Dua Modus Eksistensi*. Penerjemah F. Soesilohardo. Jakarta: LP3ES.
- Hardy, G.M. (1998). "Ketubuhan Perempuan dalam Interaksi Sosial: Suatu Masalah Perempuan dalam Heterogenitas Kelompoknya". Dalam Arimbi, Indrawasti Dyah Saptaningrum dan Sri Sulistyani (Ed.) *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta: Kanisius, Hal: 119-138.
- Hendarto, H. (1993). "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci". Dalam Tim Redaksi Driyarkara ed., *Capita Selecta Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: PT Gramedia. Halaman 66-88.
- Hines, Ruth D. (1992). "Accounting: Filling The Negative Space". *Accounting, Organization and Society*. Vol. 17. No. 3/ 4, pp.313-341.
- Jackson, R. *Friedrich Nietzsche*. Penerjemah Abdul Mukhid. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Jaman, I Gd. (1998). *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagadhita)*. Denpasar: Paramita.
- Kellner, D. (2003). *Teori Sosial Radikal*. Penerjemah Eko – Rindang Farichah. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Kim, So Nam. (2001). *Radicalized Gendering of The Accountancy Profession: Toward an Understanding of Chinese Women's Experiences in Accountancy in New Zealand*. From web site: <http://aux.zicklin.baruch.cuny.edu/critical/html2/8007kim.html>
- Kirkham, Linda M. (1992). "Intergrating Herstory and History in Accountancy". *Accounting, Organization and Society*. Vol. 17 No.3/ 4, pp. 287-297.
- Kirkham, Linda M. and Anne Loft. (1993). "Gender and The Construction of The Professional Accountant". *Accounting Organization and Society*. Vol. 18. No. 6. pp. 507-558.
- Knapp. M. C. (2001). *Contemporary Auditing: Issues and Cases*. Ohio: Sout-Western College Publishing.
- Kusujarti, S. (1997). "Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa". Dalam Irwan Abdulah (Ed.), *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Larkin, Joseph M. (1997). "Upward Mobility in Public Accounting: A Gender-Specific Student Perspectives". *Journal of Applied Business Research*. Vol.13 No.2.
- Lehman, C.R. (1992). "Quiet Whisper.Men Accounting for Women: West to East". *Accounting, Organization and Society*. Volume 17, No. 3/ 4.
- Magniz-Suseno, Franz. (1999). *Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru*



- tentang Relasi Gender*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mufidah. (2003). *Paradigma Gender*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mulyana, Dedy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marcuse. H. (2004). *Cinta dan Peradaban*. Penerjemah Imam Baeheaqie. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murniati. A Nunuk P. (2004). *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM) Buku Pertama*. Magelang: Indonesia Tera.
- Murniati. A Nunuk P. (2004). *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga) Buku Kedua*. Magelang: Indonesia Tera.
- Norris, Christopher. (2003). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Penerjemah Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz.
- O'Neil, William F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Penerjemah Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Panetje, G. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Kayumas.
- Pease, Allan dan Barbara Pease. (2004). *Rahasia Perempuan, Dosa Laki-laki*. Penerjemah Amin Rosani Pane Yogyakarta: Pradipta Publishing.
- Pelto, Pertti J. and Gretel H. Pelto. (1984). *Anthropological Research The Structure of Inquiry*. University of Cambridge.
- Piliang, Yasraf Amir. (2004). *Posrealitas Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pudja, G. (1975). *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*. Jakarta: Maya Sari.
- Raffield, Janice M. and Frank J. Coglitore. (1992). "Advancement in Public Accounting: The Effect of Gender and Personality Traits". *Accounting Organization and Society*. Volume 11.
- Ritzer, George. (1985). *Sosiologi. Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Penerjemah Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Robinson, P. (1986). *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Penerjemah Hasan Basari. Jakarta: CV. Rajawali
- Rowatt, C.W. dan M.J. Rowatt. (1990). *Bila Suami Istri Bekerja*. Penerjemah: YB Tugiyarso. Yogyakarta: Kanisius.
- Scott, William R. (2003). *Financial Accounting Theory*. Third Edition. Pearson Education Canada.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. (2003). *Membaca Pemikiran Jacques Derrida*. Penerjemah Inyik Nurdin Muzir. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz.

- Stedham, Yvonne, Jeanne H. Yammamura and Michimasa Satoh. (2003). *Gender and Salary: A Study of Accountant in Japan*. From web site: [www.sba.muohio.edu/abas/2003/vancouver/stedham](http://www.sba.muohio.edu/abas/2003/vancouver/stedham)
- Stevenson L. dan D.L. Haberman. (2001). *Sepuluh Teori Hakikat Manusia*. Penerjemah Yudi Santoso dan Saut Pasaribu. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Storey, J. (2001). *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta: Qalam.
- Synnott, A. (2003). *Tubuh Sosial Simbolisme, Diri dan Masyarakat*. Penerjemah Yudi Susanto. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tester, K. (2003). *Seri Cultural Studies Media, Budaya, dan Moralitas*. Penerjemah Muhammad Syukri. Yogyakarta: Yuxtapose.
- Thompson, John B. (2003). *Analisis Ideologi Kritik Wacana-wacana Ideologi Dunia*. Penerjemah Haqqul Yakin. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan (Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural)*. Magelang: Indonesia Tera.
- Weisel, M.S. (1991). "Employer's Burden of Proof in 'Mixed Motive' Title VIII Litigation and Available Remedies: Hopkins vs Price Waterhouse One Year Later". *Labor Law Journal*, Vol. 42, No. 1.
- Wiana, I Ketut. (1992). *Palinggih di Pemerajan*. Denpasar: Upada Sastra.
- Wiana, I Ketut. (1998). *Berbakti Kepada Leluhur Upacara Pitra Yadnya dan Upacara Nuntun Dewa Hyang*. Surabaya: Upada Sastra.
- Wikarman, I Nym. S.(1993). *Sanggah Kamulan Fungsi dan Pengeriannya*. Bangli: Yayasan Widya Shanti.
- Wolf, N. (1991). *The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*. New York: Doubleday.